

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

#### 2.1. Kajian Pustaka

##### 2.1.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

*Agency Theory* adalah penerapan dalam organisasi modern. Teori agensi mementingkan pentingnya pemilik perusahaan atau pemegang saham dalam menyerahkan pengelolaan perusahaan kepada jasa profesional yang disebut agen. Tujuan pemisahan pengelolaan dan kepemilikan perusahaan adalah agar pemilik perusahaan menjalankan perusahaan melalui staff profesional mereka untuk memperoleh keuntungan maksimum dengan biaya yang paling efisien. Fungsi dari staff profesional yaitu untuk melayani kepentingan para pemilik perusahaan dan memiliki kebebasan untuk mengambil alih manajemen perusahaan. Dalam hal ini, para profesional akan mewakili pemegang saham. Semakin besar perusahaan yang dikelola maka semakin besar juga keuntungan agen. Tetapi pemilik perusahaan atau pemegang saham hanya bertugas mengawasi dan memantau jalannya perusahaan yang dikelola oleh manajemen dan mengembangkan sistem insentif bagi manajemen untuk memastikan bahwa mereka bekerja untuk kepentingan perusahaan. Namun di sisi lain, memiliki kekurangan dimana adanya kebebasan manajemen untuk memaksimalkan keuntungan perusahaan dapat mengarah pada proses memaksimalkan keuntungan pemilik perusahaan, serta menanggung beban dan biaya yang harus ditanggung oleh pemilik perusahaan. Selain itu, pemisahan ini dapat menyebabkan kurangnya transparansi dalam penggunaan dana

perusahaan dan keseimbangan yang tepat dari kepentingan yang ada. Misalnya antara pemegang saham dan manajemen perusahaan dan antara pemegang saham mayoritas dan minoritas (Tandiontong, 2015).

Menurut Jensen dan Meckling (1976) dan Scott (2000) Teori Keagenan (*Agency Theory*) merupakan sebagai suatu versi dari *game theory* yang melaksanakan suatu perjanjian antara dua atau lebih pihak, dimana salah satu pihak disebut agen dan pihak yang lain disebut *principal*. *Principal* mendelegasikan tanggung jawab untuk pengambilan keputusan kepada agen. Prinsipal juga dapat dikatakan memastikan agen untuk melakukan tugas-tugas tertentu sesuai dengan kontrak kerja yang telah disepakati. Wewenang dan tanggung jawab agen ataupun principal telah di atur di dalam kontrak kerja atas persetujuan kedua belah pihak. Di dalam Teori Keagenan (*Agency Theory*) dijelaskan bahwa perlunya jasa independen auditor yang dijelaskan di dasar teori keagenan (*Agency Theory*), yaitu hubungan antara pemilik (prinsipal) dengan manajemen (agen). Dalam perkembangan perusahaan dan entitas bisnis yang lebih besar, maka konflik sering muncul antara klien, dalam hal ini pemegang saham (investor) dan pihak agen di wakili oleh manajemen (direksi). Anggapan bahwa manajemen yang terlibat dalam suatu perusahaan selalu memaksimalkan nilai perusahaan tidak selalu terpenuhi. Karena pemilik perusahaan memiliki kepentingan pribadi yang bertentangan dengan kepentingan pemilik perusahaan, *asymetric information* menimbulkan masalah yang disebut dengan masalah keagenan. Menurut (Silaban, 2020) Untuk mengurangi adanya masalah agensi maka diperlukan adanya pihak independen yang dapat menjadi pihak penengah

untuk menangani konflik tersebut yang lebih dikenal sebagai independen auditor.

Menurut (Silaban, 2020) menjelaskan teori keagenan bahwa hubungan manajemen (agen) dengan pemegang saham (stakeholders) yang disebut dengan prinsipal. Munculnya perbedaan kepentingan diantara pihak internal dan eksternal sehingga menimbulkan konflik kepentingan. Sehingga dibutuhkan pihak penengah untuk menghadapi konflik tersebut yaitu membutuhkan auditor eksternal yang bertugas untuk mengevaluasi dan memberikan opini terkait laporan keuangan perusahaan yang telah di buat dan disusun oleh manajemen sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Untuk menyakinkan dan dapat dipercaya laporan keuangan perusahaan tersebut maka diperoleh Akuntan Publik untuk memeriksa kembali bahwa laporan keuangan perusahaan terbebas dari kecurangan dan telah di susun dengan standar akuntansi yang berlaku dan mendapatkan opini laporan keuangan wajar tanpa pengecualian.

### **2.1.2 Teori *Stewardship***

Teori *Stewardship* adalah suatu hubungan antara kepuasan pihak berkepentingan dan kesuksesan organisasi. Kesuksesan organisasi ditunjukkan dengan kepuasan relatif kelompok principal dan manajemen (Davis, 1991) . Teori *Stewardship* memandang bahwa publik memiliki kepercayaan terhadap manajemen untuk melakukan tindakan yang baik dan berguna untuk kepentingan bersama baik secara khusus maupun umum. Implikasi dari teori *stewardship* pada penelitian ini adalah pemerintah. Dimana pemerintah berlaku sebagai *steward* dan masyarakat sebagai *principal*. Pemerintah akan bekerja sebaik-

baiknya untuk kepentingan rakyatnya dalam hal transparansi pelaporan keuangan. Pemerintah mempunyai kewajiban untuk menyediakan dan menyajikan informasi secara akurat dan benar bagi publik.

### **2.1.3 Pendapatan Asli Daerah**

#### **2.1.3.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah**

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan pada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah menjelaskan mengenai Pendapatan Asli Daerah yaitu : “Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”

Menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 menjelaskan mengenai Pendapatan Asli Daerah yaitu :

“Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber penerimaan daerah asli yang digali di daerah tersebut untuk digunakan sebagai modal dasar pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan usaha-usaha daerah untuk memperkecil ketergantungan dana dari pemerintah pusat.”

“Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil

pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai mewujudkan asas desentralisasi.” (Japar, 2022)

“Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. (Alhausin, 2018)

“Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil retribusi daerah, hasil kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah yang dikelola oleh pemerintah daerah itu sendiri.” (M. Saferi, 2020)

Berdasarkan definisi-definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang digali di daerah tersebut untuk digunakan sebagai modal dasar pemerintah daerah dan bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, perusahaan daerah, dinas daerah, dan lain-lain usaha yang sah yang dikelola oleh pemerintah daerah itu sendiri dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **2.1.3.2 Sumber Pendapatan Asli Daerah**

Menurut UU No 33 tahun 2004, Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, terdiri dari :

**a. Pajak Daerah**

Di dalam UU No 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dinyatakan bahwa Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selanjutnya, di dalam UU nomor 28 tahun 2009 ditegaskan bahwa pajak kabupaten/kota dibagi menjadi beberapa jenis, yakni:

1. Pajak Hotel,
2. Pajak Restoran,
3. Pajak Hiburan,
4. Pajak Reklame,
5. Pajak Penerangan Jalan,
6. Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan,
7. Pajak Parkir,
8. Pajak Air Tanah,
9. Pajak Sarang Burung Walet,
10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan
11. Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

**b. Retribusi Daerah**

Menurut UU Nomor 28 Tahun 2009 secara keseluruhan terdapat 30 jenis retribusi yang dapat dipungut oleh daerah yang dikelompokkan ke

dalam 3 golongan retribusi, yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu.

- Retribusi Jasa Umum yaitu pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Jenis retribusi umum adalah sebagai berikut :

1. Retribusi layanan kesehatan;
2. Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan;
3. Retribusi penggantian biaya cetak KTP dan Akte catatan sipil;
4. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan pengabuan mayat;
5. Retribusi pelayanan parkir tepi jalan umum;
6. Retribusi pelayanan pasar;
7. Retribusi pengujian kendaraan bermotor;
8. Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran;
9. Retribusi penggantian biaya cetak peta;
10. Retribusi penyediaan/penyedotan kakus;
11. Retribusi pengelolaan limbah cair;
12. Retribusi pelayanan tera/tera ulang;
13. Retribusi pelayanan pendidikan; dan
14. Retribusi pengendalian Menara telekomunikasi.

- Retribusi Jasa Usaha adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa usaha yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh

pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Jenis retribusi jasa usaha yakni:

1. Retribusi pemakaian kekayaan daerah;
  2. Retribusi pasar grosir/pertokoan;
  3. Retribusi tempat pelelangan;
  4. Retribusi terminal;
  5. Retribusi tempat khusus parkir;
  6. Retribusi tempat penginapan/pesanggeraan/ villa;
  7. Retribusi rumah potong hewan;
  8. Retribusi pelayanan kepelabuhan;
  9. Retribusi tempat rekreasi dan olah raga;
  10. Retribusi penyeberangan air; dan
  11. Retribusi penjualan produksi usaha daerah.
- Retribusi Perizinan Tertentu adalah pungutan daerah sebagai pembayarann atas pemberian izin tertentu yang khusus diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Jenis retribusi perizinan tertentu yakni;

1. Retribusi izin mendirikan bangunan;
2. Retribusi tempat penjualan minuman beralkohol;
3. Retribusi izin gangguan;
4. Retribusi izin trayek;
5. Retribusi izin usaha perikanan.



**c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan**

Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 mengklasifikasikan jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara/BUMN dan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok masyarakat. Halim (2004) menyebutkan bahwa jenis pendapatan ini meliputi objek pendapatan berikut:

1. Bagian laba perusahaan milik daerah
2. Bagian laba lembaga keuangan bank
3. Bagian laba lembaga keuangan non bank
4. Bagian laba atas penyertaan modal/investasi

**d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah**

Menurut UU No. 33 tahun 2004 menjelaskan tentang Pendapatan Asli Daerah yang sah, disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Halim (2004) menyebutkan jenis pendapatan ini meliputi objek pendapatan berikut :

1. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan
2. Penerimaan Jasa Giro
3. Pendapatan Bunga
4. Denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan

5. Penerimaan ganti rugi atas kerugian/kehilangan kekayaan daerah.

Adapun rumus untuk mengukur Pendapatan Asli Daerah adalah sebagai berikut :

$$\text{PAD} = \text{Pajak daerah} + \text{Retribusi Daerah} + \text{Hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan} + \text{Lain-lain pendapatan yang sah}$$

## 2.1.4 Ukuran Pemerintah Daerah

### 2.1.4.1 Pengertian Ukuran Pemerintah Daerah

Ukuran pemerintah daerah adalah salah satu variabel dalam besar atau kecilnya pemerintahan suatu daerah yang dapat diukur dengan total aset, jumlah pegawai, total pendapatan dan tingkat produktivitas. Ukuran pemerintah dapat diproksikan sebagai total aset yang dimiliki daerah tersebut dan memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

“Ukuran Pemerintah Daerah merupakan suatu skala pengukuran yang digunakan untuk menggambarkan tingkat besar kecilnya suatu daerah yang diukur dengan total aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Semakin besarnya tingkat ukuran pemerintah daerah maka dapat memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat dan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi didaerah tersebut.” (Nova, 2020)

“Ukuran Pemerintah Daerah adalah gambaran seberapa besar/kecil skala dari pemerintah daerah.” (M. Saferi, 2020)

“Ukuran pemerintah merupakan nilai yang menunjukkan besar kecilnya pemerintah daerah.” (Martin Tamaro Siburian, 2021)

Berdasarkan definisi - definisi di atas dapat disimpulkan bahwa ukuran pemerintah daerah adalah suatu skala pengukuran yang digunakan untuk

menggambarkan tingkat besar kecilnya suatu daerah yang dapat diukur dengan total aset, jumlah pegawai, total pendapatan dan tingkat produktivitas yang dimiliki oleh pemerintah daerah.

## **2.1.5 Kompleksitas Pemerintah Daerah**

### **2.1.5.1 Pengertian Kompleksitas Pemerintah Daerah**

Kompleksitas daerah ditandai dengan terjadinya diferensiasi atau pemisahan tugas-tugas yang ada pada suatu entitas. Kompleksitas pemerintahan daerah juga dapat diartikan sebagai suatu kondisi yang mempengaruhi pemerintahan daerah karena terdapatnya berbagai faktor dan karakteristik yang beragam pada daerah tersebut (Kiswanto,2020). Kompleksitas daerah dicerminkan dengan terdapatnya lapisan dalam suatu organisasi meliputi lapisan spesialisasi pemisahan tugas, lapisan total dalam hirarki kelembagaan, dan ukuran sejauh mana unit organisasi tersebar wilayahnya guna mencapai tujuan pelaksanaan internal kontrol. Kompleksitas daerah dalam penelitian ini ukur dengan melihat jumlah kecamatan yang terdapat dalam suatu daerah. Diduga tingkat keberhasilan suatu daerah dalam menjalankan tugasnya akan mengalami penurunan jika suatu daerah memiliki tingkat kompleksitas daerah yang tinggi. (Aini, 2017)

“Kompleksitas pemerintah daerah adalah keberagaman karakteristik pada pemerintah daerah yang dapat memengaruhi pencapaian tujuan organisasi.” (Winda Khairana, 2018)

“Kompleksitas pemerintah daerah adalah tingkatan diferensiasi yang ada di pemerintah daerah yang menyebabkan konflik atau masalah dalam rangka pencapaian tujuan pemerintah daerah.” (M. Saferi, 2020)

“Kompleksitas dalam pemerintahan dapat diartikan sebagai kondisi dimana terdapat beragam faktor dengan karakteristik berbeda-beda yang mempengaruhi pemerintahan baik secara langsung maupun tidak langsung.” (Aini, 2017)

Berdasarkan definisi - definisi di atas dapat disimpulkan bahwa kompleksitas pemerintah daerah adalah suatu kondisi yang mempengaruhi pemerintah daerah yang menyebabkan konflik atau masalah dalam rangka pencapaian tujuan pemerintah yang terdapat beragam faktor dengan karakteristik pada pemerintah daerah yang berbeda - beda.

## **2.1.6 Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Daerah**

### **2.1.6.1 Pengertian Sistem Pengendalian Internal Pemerintah**

Sistem pengendalian internal adalah suatu upaya yang dipengaruhi oleh dewan komisaris, manajemen, dan juga personel satuan usaha lainnya yang dibuat untuk memiliki keyakinan yang cukup terkait pencapaian tujuan dalam hal keandalan laporan keuangan, ketepatan dengan aturan yang ada, efektifitas, dan juga efisiensi operasional perusahaan.

“Pengendalian internal merupakan prosedur dan kebijakan untuk menjaga agar aktiva bebas dari penyelewengan dan memastikan bahwa informasi yang diberikan akurat serta telah mengikuti hukum atau peraturan yang ada.” (Alwina Noviani, 2020)

“Pengendalian internal (*internal control*) merupakan bagian dari perencanaan sebuah organisasi untuk mengamankan aset, mendorong

karyawan untuk mengikuti kebijakan perusahaan, meningkatkan efisiensi operasi dan memastikan pencatatan akuntansi yang akurat dan handal.” (Ratna Sari, 2021)

Menurut PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP pengertian

Pengendalian Internal sebagai berikut:

"Proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan."

Berdasarkan definisi-definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pengendalian internal adalah suatu prosedur dan kebijakan atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisiensi, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

#### **2.1.6.2 Tujuan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah**

Menurut (*Framework, 2013*) pengendalian internal mempunyai tiga tujuan, antara lain :

a. Tujuan Operasi

Berkaitan dengan efektifitas dan efisiensi operasi entitas, termaksud tujuan kinerja operasional dan keuangan , menjaga aset terhadap kerugian.

b. Tujuan Pelaporan

Berkaitan dengan pelaporan keuangan dan pelaporan non keuangan, untuk internal maupun eksternal, mencakup keandalan, ketepatan waktu atau persyaratan lain yang ditetapkan.

c. Tujuan Kepatuhan

Berkaitan dengan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang mana entitas dapat mematuhi.

### **2.1.6.3 Kelemahan Pengendalian Internal Pemerintah Daerah**

Berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang merujuk pada Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) dijelaskan kelemahan pengendalian intern adalah kondisi dimana pengendalian intern yang dijalankan mengalami kekurangan material pada desain dan operasinya sehingga menimbulkan masalah pengendalian intern yang mengganggu kegiatan organisasi dalam beroperasi. Kelemahan pengendalian intern merupakan kelemahan yang signifikan yang jauh dari kondisi salah saji material yang dapat dilihat dari laporan keuangan yang tidak dapat dicegah atau dideteksi.

”Kelemahan pengendalian internal pemerintah daerah adalah ketidakendalian yang cukup dan dapat meningkatkan resiko salah saji atau salah pencatatan dalam menyampaikan laporan keuangan.” (M. Saferi, 2020)

## 2.2 Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian yang dilakukan oleh penelitian-penelitian terdahulu mengenai pendapatan asli daerah, ukuran pemerintah daerah dan kompleksitas pemerintah daerah yaitu sebagai berikut :

**Tabel 2. 1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Peneliti	Judul Penelitian	Variable	Hasil Penelitian
1	Mustikasari, Fransisca Ardiani (2021)	Pengaruh Kompleksitas Pemerintah, Ukuran Pemerintah, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Khusus dan Belanja Modal Terhadap Kelemahan Pengendalian Internal Pemerintah Daerah di Indonesia Tahun 2016-2018	<p><b>Variable Bebas :</b> Kompleksitas Pemerintah, Ukuran Pemerintah, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Khusus dan Belanja Modal</p> <p><b>Variable Terkait :</b> Kelemahan Pengendalian Internal Pemerintah Daerah</p>	Kompleksitas Pemerintah dan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan positif terhadap Kelemahan Pengendalian Intern. Sedangkan Ukuran Pemerintah, Pertumbuhan Ekonomi, Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh signifikan terhadap Kelemahan Pengendalian Intern. Sedangkan Belanja Modal berpengaruh negatif signifikan terhadap Kelemahan

No	Peneliti	Judul Penelitian	Variable	Hasil Penelitian
				Pengendalian Intern.
2.	Juda Pratama Sutomo (2018)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Kompleksitas Terhadap Kelemahan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, D.I.Y, dan Jawa Timur Tahun 2014)	<p><b>Variable Bebas :</b> Pendapatan Asli Daerah dan Kompleksitas</p> <p><b>Variable Terkait :</b> Kelemahan Pengendalian Internal Pemerintah Daerah</p>	Jumlah kecamatan berpengaruh terhadap kelemahan sistem pengendalian intern pemerintah daerah. Sedangkan pendapatan asli daerah, dan jumlah penduduk tidak berpengaruh terhadap kelemahan sistem pengendalian intern pemerintah daerah.
3.	Melia Andesti, Henri Agustin (2022)	Pengaruh Kompleksitas Pemerintah Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kelemahan Pengendalian Internal Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah Kab/Kota di Provinsi Aceh dan Sumatera	<p><b>Variable Bebas :</b> Kompleksitas Pemerintah Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi</p> <p><b>Variable Terkait :</b> Kelemahan Pengendalian Internal Pemerintah Daerah</p>	Kompleksitas pemerintah daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kelemahan pengendalian internal pemerintah daerah, ukuran pemerintah daerah berpengaruh negatif signifikan terhadap kelemahan



No	Peneliti	Judul Penelitian	Variable	Hasil Penelitian
		Utara tahun 2017-2019)		pengendalian internal pemerintah daerah. Sedangkan pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap kelemahan pengendalian internal pemerintah daerah.
4	Shalsadila Putri Gumilan, Rino Dwi Putra (2019)	Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal Terhadap Kelemahan Pengendalian Pemerintah Daerah	<b>Variable Bebas :</b> Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal  <b>Variable Terkait :</b> Kelemahan Pengendalian Internal Pemerintah Daerah	Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap kelemahan pengendalian internal pemerintah daerah, pendapatan asli daerah tidak berpengaruh terhadap kelemahan pengendalian internal dan belanja modal berpengaruh negatif terhadap kelemahan pengendalian internal pemerintah daerah.
5	Batubara, Chairunnisa (2022)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Belanja	<b>Variable Bebas :</b>	Pendapatan asli daerah, dana alokasi

No	Peneliti	Judul Penelitian	Variable	Hasil Penelitian
		<p>Modal, Dana Alokasi Umum, Pertumbuhan Ekonomi dan Kompleksitas Terhadap Kelemahan Pengendalian Internal Pemerintah Tahun 2018-2020 (Studi Empiris Kabupaten/Kota di Sumatera Utara)</p>	<p>Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal, Dana Alokasi Umum, Pertumbuhan Ekonomi dan Kompleksitas</p> <p><b>Variable Terkait :</b> Kelemahan Pengendalian Internal Pemerintah</p>	<p>umum, dan kompleksitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kelemahan pengendalian intern pemerintah. Belanja modal dan pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap kelemahan pengendalian intern pemerintah. Secara simultan variabel pendapatan asli daerah, belanja modal, dana alokasi umum, pertumbuhan ekonomi, dan kompleksitas berpengaruh signifikan terhadap kelemahan pengendalian intern pemerintah</p>
6	Samhah, Hanifatus (2018)	<p>Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Kompleksitas</p>	<p><b>Variable Bebas :</b> Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah,</p>	<p>Pertumbuhan ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah memiliki pengaruh</p>

No	Peneliti	Judul Penelitian	Variable	Hasil Penelitian
		Daerah dan Belanja Modal Terhadap Kelemahan Pengendalian Internal Pemerintah Daerah	Kompleksitas Daerah dan Belanja Modal  <b>Variable Terkait :</b> Kelemahan Pengendalian Internal Pemerintah Daerah	positif terhadap kelemahan pengendalian internal pemerintah daerah. Sedangkan untuk kompleksitas daerah dan belanja modal tidak berpengaruh terhadap kelemahan pengendalian internal pemerintah daerah.
7	Ika Novitasari (2018)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Kompleksitas (SKPD), Belanja Modal dan Ukuran Pemerintah Daerah Terhadap Kelemahan Pengendalian Inter Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Pulau Jawa Tahun 2016)	<b>Variable Bebas :</b> Pendapatan Asli Daerah, Kompleksitas (SKPD), Belanja Modal dan Ukuran Pemerintah Daerah  <b>Variable Terkait :</b> Kelemahan Pengendalian Internal Pemerintah Daerah	Pendapatan asli daerah dan kompleksitas berpengaruh terhadap kelemahan pengendalian intern pemerintah daerah. Namun, hanya pendapatan asli daerah yang hipotesisnya diterima, karena kompleksitas berbeda arah. Belanja modal dan ukuran pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap

No	Peneliti	Judul Penelitian	Variable	Hasil Penelitian
				kelemahan pengendalian internal pemerintah daerah.
8	Sitorus, Ria Natalia (2022)	Pengaruh Ukuran Pemerintah, Kompleksitas, Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal Terhadap Kelemahan Pengendalian Internal Pemerintah Daerah pada Kota/Kabupaten Sumatera Utara	<p><b>Variable Bebas :</b></p> <p>Pengaruh Ukuran Pemerintah, Kompleksitas, Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal</p> <p><b>Variable Terkait :</b></p> <p>Kelemahan Pengendalian Internal Pemerintah Daerah</p>	<p>Hasil penelitian ini membuktikan bahwa secara parsial, ukuran pemerintah, kompleksitas, dan belanja modal tidak berpengaruh signifikan terhadap Lemahnya Pengendalian Intern Pemerintah Daerah. Sedangkan Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Lemahnya Pengendalian Intern Pemerintah Daerah. Secara Simultan Ukuran Pemerintahan, Kompleksitas, Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah,</p>

No	Peneliti	Judul Penelitian	Variable	Hasil Penelitian
				dan Belanja Modal Berpengaruh Signifikan Terhadap Lemahnya Pengendalian Intern Pemerintah Daerah di Sumatera Utara
9	Suci, Santi Asmara (2021)	Pengaruh Ukuran Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Belanja Modal dan Kompleksitas Terhadap Kelemahan Pengendalian Intern Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Provinsi Daerah Istimewa (DI) Yogyakarta Periode 2015-2019)	<b>Variable Bebas :</b> Ukuran Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Belanja Modal dan Kompleksitas  <b>Variable Terkait :</b> Kelemahan Pengendalian Intern Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Provinsi Daerah Istimewa (DI) Yogyakarta Periode 2015-2019)	Ukuran daerah berpengaruh negatif (signifikan) terhadap kelemahan pengendalian intern, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan kompleksitas memiliki pengaruh positif (signifikan) terhadap kelemahan pengendalian intern, sedangkan belanja modal tidak terdapat pengaruh negatif (signifikan) terhadap kelemahan pengendalian intern.
10	Fakhry Septian	Pengaruh Pertumbuhan	<b>Variable Bebas :</b>	Hasil yang diperoleh

No	Peneliti	Judul Penelitian	Variable	Hasil Penelitian
	Pasha (2022)	Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Ukuran Entitas Pemerintah Daerah Terhadap Kelemahan Pengendalian Internal Saat Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Pemerintah Daerah Provinsi di Pulau Jawa dan Bali)	<p>Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Ukuran Entitas Pemerintah Daerah</p> <p><b>Variable Terkait:</b></p> <p>Kelemahan Pengendalian Intern</p>	<p>menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi dan pendapatan asli daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kelemahan pengendalian internal saat pandemi COVID-19. Sedangkan ukuran entitas pemerintah daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap kelemahan pengendalian internal saat pandemi COVID-19.</p>
11	Fitriatul Aini (2017)	Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Kompleksitas Daerah dan Belanja Modal Terhadap Kelemahan Pengendalian Intern Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Daerah Provinsi)	<p><b>Variabel Bebas :</b></p> <p>Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Kompleksitas Daerah dan Belanja Modal</p> <p><b>Variabel Terkait :</b></p> <p>Kelemahan Pengendalian Intern Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Daerah)</p>	<p>Hasil menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan negatif terhadap kelemahan pengendalian intern pemerintah daerah, pendapatan asli daerah berpengaruh</p>

No	Peneliti	Judul Penelitian	Variable	Hasil Penelitian
		di Indonesia Periode 2011-2012)	Provinsi di Indonesia Periode 2011-2012)	signifikan negatif terhadap kelemahan pengendalian intern pemerintah daerah, kompleksitas daerah dan belanja modal berpengaruh signifikan positif terhadap kelemahan pengendalian intern
12	Arif Kurniawan Wahono (2007)	The Influence of Economic Growth, The Size of Local Government, Regional Original Income and The Complexity of Local Government on The Weaknesses of Local Government Internal Control	<b>Variabel Bebas :</b> Economic Growth, The Size of Local Government, Regional Original Income and The Complexity of Local Government  <b>Variabel Terikat :</b> The Weaknesses of Local Government Internal Control	Ukuran pemerintah berpengaruh signifikan terhadap kelemahan pengendalian internal. Pertumbuhan ekonomi, PAD dan kompleksitas tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap pengendalian internal kelemahan.

## **2.3 Kerangka Pemikiran**

### **2.3.1 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kelemahan Pengendalian Internal Pemerintah Daerah**

Teori Keagenan menjelaskan bahwa pemerintah daerah sebagai *agent* bagi masyarakat tentu akan melakukan kegiatan selain dalam memenuhi pelayanan bagi masyarakat tetapi juga dalam memenuhi kepentingan pribadinya. Pendapatan asli daerah mempunyai pengaruh positif terhadap kelemahan pengendalian internal karena merupakan pemasukan bagi daerah yang digunakan untuk menjalankan pembangunan, dalam suatu daerah membuat sumber pendapatan asli daerah semakin besar sehingga masalah terkait kelemahan pengendalian internal semakin tinggi. Semakin besar pendapatan asli daerah dapat menjadi sebuah ladang terjadinya tindak kecurangan.

Pendapatan asli daerah berpengaruh positif pada kelemahan pengendalian intern, sehingga hipotesis yang menyatakan pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap kelemahan pengendalian intern dapat diterima. Menyatakan penelitian ini dapat diartikan bahwa pemerintah daerah yang memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tinggi akan lebih sulit untuk melakukan pengawasan terhadap pendapatan yang diterima karena pemerintah daerah memiliki kewenangan yang luas untuk mengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini mengakibatkan meningkatnya resiko kecurangan dalam pengelolaan keuangan daerah oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dan juga dapat menyebabkan kelemahan pengendalian intern menjadi meningkat (Sutomo, 2018).



Penelitian (Mustikasari, 2021) menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Kelemahan Pengendalian Internal Pemerintah Daerah. Penelitian (Handayani, 2018) menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Kelemahan Pengendalian Internal Pemerintah Daerah. Penelitian (Chairunnisa, 2022) menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Kelemahan Pengendalian Internal Pemerintah Daerah. Penelitian (Novitasari, 2018) menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Kelemahan Pengendalian Internal Pemerintah Daerah. Penelitian (Samhah, 2018) menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Kelemahan Pengendalian Internal Pemerintah Daerah.

Berdasarkan penelitian-penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa semakin besar pendapatan asli daerah akan berpengaruh positif terhadap kelemahan pengendalian intern.

### **2.3.2 Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah Terhadap Kelemahan Pengendalian Internal Pemerintah Daerah**

Dalam pemerintahan daerah ukuran pemerintah daerah dapat diproksikan dengan total aset. Teori *Stewardship* menjelaskan bahwa pemerintah dalam menjalankan tugasnya harus mampu menjalankan tanggung jawabnya dengan baik agar berdampak kepada kesejahteraan masyarakat, yang bertujuan untuk menjaga hubungan baiknya dengan masyarakat selaku *stewardship*. Total aset yang besar akan mendukung pemerintah daerah dalam upaya memenuhi tanggung jawabnya kepada publik. Karenanya pemerintah daerah yang memiliki

aset dalam jumlah besar akan disadarkan untuk meningkatkan pengawasan yang baik melalui penerapan sistem pengendalian internal yang optimal untuk menjaga keamanan aset yang dimiliki dari segala bentuk kecurangan agar upaya untuk memberikan pelayanan yang memadai kepada masyarakat dapat tercapai. Pemerintah daerah yang memiliki ukuran yang besar akan lebih optimal dalam menerapkan pengendalian internal secara lebih optimal dengan melakukan *maintenance* terhadap sistem yang diterapkan, sehingga akan meminimalisir terjadinya masalah pengendalian internal

Pada penelitian yang dilakukan oleh (Suci, 2021) menunjukkan bahwa Ukuran Pemerintah Daerah berpengaruh negatif terhadap Kelemahan Pengendalian Internal Pemerintah Daerah. Penelitian yang dilakukan oleh (Agustin, 2022) menunjukkan bahwa Ukuran Pemerintah Daerah berpengaruh negatif terhadap Kelemahan Pengendalian Internal Pemerintah Daerah. Penelitian (M. Saferi, 2020) menunjukkan bahwa Ukuran Pemerintah Daerah berpengaruh negatif terhadap Kelemahan Pengendalian Internal Pemerintah Daerah.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa semakin besar Ukuran Pemerintah Daerah akan berpengaruh negatif terhadap Kelemahan Pengendalian Internal Pemerintah Daerah.

### **2.3.3 Pengaruh Kompleksitas Pemerintah Daerah Terhadap Kelemahan Pengendalian Internal Pemerintah Daerah**

Teori keagenan memandang bahwa kompleksitas pemerintah daerah sebagai *agent* bagi masyarakat (*principal*) akan bertindak dengan penuh kesadaran bagi kepentingan mereka sendiri serta memandang bahwa kompleksitas pemerintah daerah tidak dapat dipercaya untuk bertindak dengan sebaik-baiknya bagi kepentingan masyarakat. *Agency theory* beranggapan bahwa banyak terjadi *information asymmetry* antara pihak agen (pemerintah) yang mempunyai akses langsung terhadap informasi dengan pihak prinsipal (masyarakat) (Chairunnisa, 2022).

Tingkatan perbedaan yang ada di suatu daerah yang dapat menimbulkan suatu konflik yang dampaknya akan mengganggu pencapaian tujuan dari suatu daerah untuk mensejahterakan masyarakatnya. Dengan adanya tingkat perbedaan yang ada di pemerintah daerah maka semakin kompleks pemerintah daerah akan diikuti dengan semakin banyaknya ragam rencana kerja dan semakin banyak jumlah kegiatan yang perlu dibiayai sesuai dengan kebutuhan tiap wilayah yang heterogen atau berbeda-beda tergantung karakteristik tiap-tiap wilayah. Banyaknya rencana kerja dan kegiatan yang dilaksanakan akan menambah beban kerja pada sistem pengendalian internal dan menurunkan efektivitas sistem pengendalian intern (Chairunnisa, 2022).

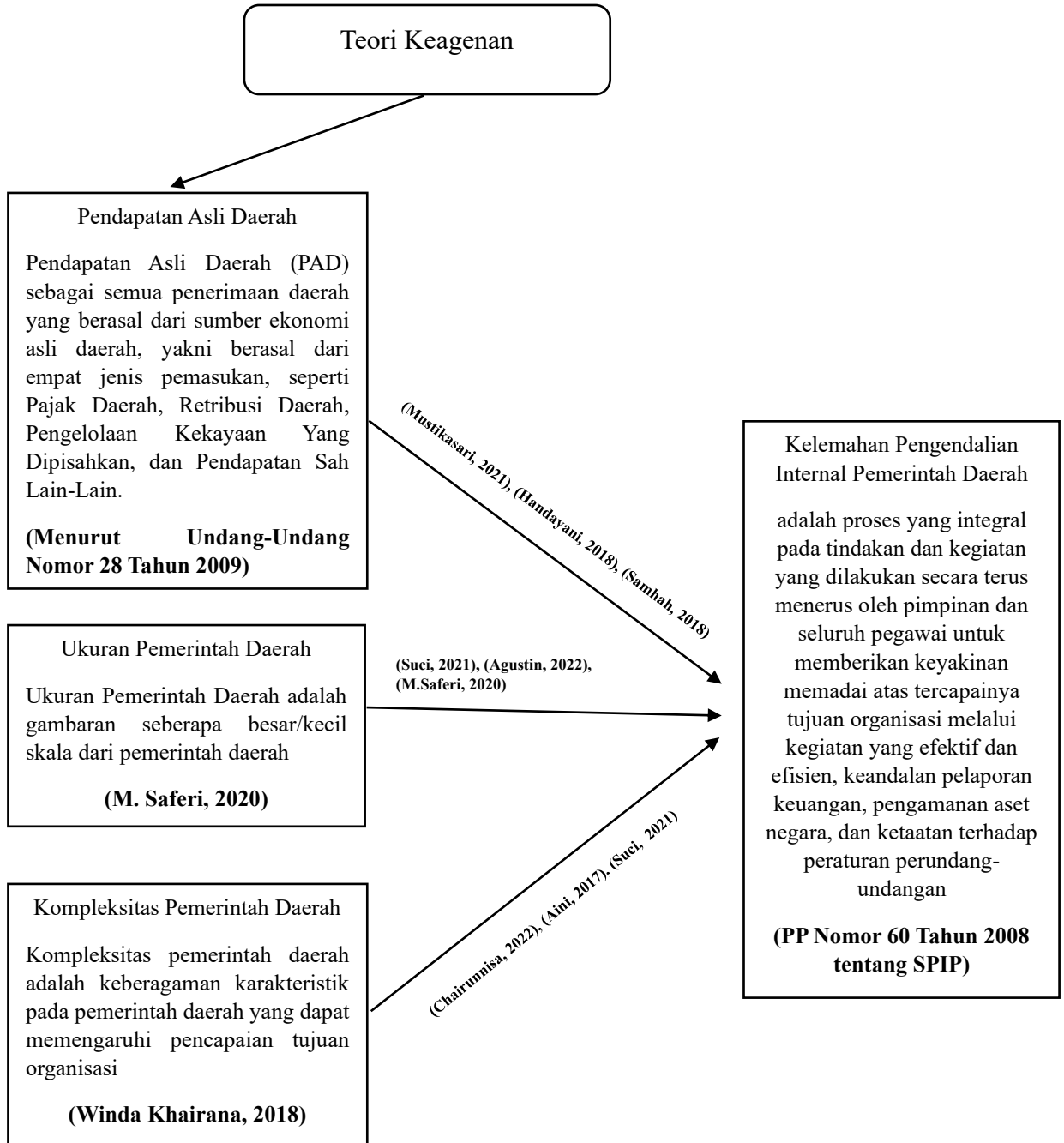
Selain itu, kompleksitas juga dapat disebabkan oleh struktur organisasi yang lemah. Hal ini disebabkan oleh banyaknya urusan yang menjadi prioritas pemerintah daerah untuk menerapkan pengendalian intern pada setiap

pemerintah daerah. Kompleksitas pemerintahan daerah dapat dilihat dari lingkup dalam maupun luar organisasi. Semakin kompleks suatu organisasi dalam menjalankan kegiatan dan memiliki area kerja yang tersebar akan semakin sulit pengendalian intern dijalankan. Organisasi menghadapi tantangan yang lebih besar dalam mengimplementasikan pengendalian intern secara konsisten untuk setiap bagian yang berbeda. Kompleksnya jumlah segmen atau cabang organisasi pemerintah daerah mengandung resiko kelemahan yang lebih besar dan membutuhkan pengendalian intern yang lebih canggih dan baik.

Penelitian yang dilakukan oleh (Suci, 2021) menunjukkan bahwa Kompleksitas Pemerintah Daerah berpengaruh positif terhadap Kelemahan Pengendalian Internal Pemerintah Daerah, Penelitian (Chairunnisa, 2022) menunjukkan bahwa Kompleksitas Pemerintah Daerah berpengaruh positif terhadap Kelemahan Pengendalian Internal Pemerintah Daerah. Penelitian (Aini, 2017) menunjukkan bahwa Kompleksitas Pemerintah Daerah berpengaruh positif terhadap Kelemahan Pengendalian Internal Pemerintah Daerah. Penelitian (Mustikasari, 2021) menunjukkan bahwa Kompleksitas Pemerintah Daerah berpengaruh positif terhadap Kelemahan Pengendalian Internal. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa semakin besar Kompleksitas Pemerintah Daerah akan berpengaruh positif terhadap Kelemahan Pengendalian Internal Pemerintah Daerah.

Berdasarkan uraian diatas, penulis menyusun kerangka pemikiran

dalam bentuk sebagai berikut :



**Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran**

## 2.4 Hipotesis Penelitian

Hipotesis pada umumnya diartikan sebagai jawaban (dugaan) sementara dari masalah suatu penelitian. Hipotesis hanya disusun dalam jenis penelitian inferensial, yakni jenis penelitian dengan pendekatan kuantitatif yang bertujuan untuk menguji.

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian dan didasarkan fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data (Sugiyono, 2019). Berdasarkan uraian dari tinjauan pustaka dan kerangka pemikiran di atas maka penulis mengajukan hipotesis sebagai berikut :

H1 : Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap

Kelemahan Pengendalian Internal Pemerintah Daerah

H2 : Ukuran Pemerintah Daerah berpengaruh negatif terhadap

Kelemahan Pengendalian Internal Pemerintah Daerah

H3 : Kompleksitas Pemerintah Daerah berpengaruh positif terhadap

Kelemahan Pengendalian Internal Pemerintah Daerah